

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2/Kept/Sekda/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2/Kept/Sekda/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2/Kept/Sekda/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 yaitu pada:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Organisasi; dan
- c. Bagian Umum dan Protokol,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 7 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14/Kept/Sekda/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2/Kept/Sekda/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	Armi Romiyanto, A.Md.	198610102010011008	Penata Muda, III/a	1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara.
2	Bagian Hukum	a. Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	197705301998032002	Penata Tk. I - III/d	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum.

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan; dan 2. Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan.
		b. Jarot Anggoro Jati, S.H.	197202152006041005	Penata Tk. I - III/d	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Bantuan Hukum; dan 2. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
3	Bagian Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Andy Yudho Nurcahyo, S.T., M.Si.	198002162010011008	Penata Tk. I - III/d	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
					2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
					3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
4	Bagian Tata Pemerintahan	Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc.	198005212009032008	Penata Tk. I - III/d	1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri; 2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; dan 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					3. Penata Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
					4. Administrasi Tata Pemerintahan	1. Pengelola Administrasi Kewilayahan; dan 2. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	a. Arki Yudha Arsono, S.Pi. M.M.M., M.URP	198606132010011008	Penata Tk. I – III/d	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		b. Arifah Wulansari S.K.M., M.Ling.	198306242006042005	Pembina, IV/a	1. Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
5	Bagian Organisasi	a. Yudhistira Susila Putra, S.STP.	199409042017081001	Penata, III/c	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
					2. Penataan Organisasi	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
		b. Denny Setiawan, S.IP.	197611232011011001	Penata Tk. I, III/d	1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 2. Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Implementasi Budaya Pemerintahan
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Agung Setyawan, S.Hut.	197604082012121001	Penata Tk.1, III/d	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual; 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial; dan 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
7	Bagian Umum dan Protokol	a. Dian Rustamaji, S.E.	197712012012121001	Penata - III/c	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		b. Kurniawan Aris Yudianto, SH.	196903071994031007	Penata Tk.I, III/d	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; dan 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan 5. Pemeliharaan Mebel.
					3. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						<p>3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan</p> <p>4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.</p>
					4. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<p>1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;</p> <p>2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan</p> <p>3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.</p>
					5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Armi Romiyanto, A.Md.	198610102010011008	Penata Muda, III/a	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara.
					2. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan

NO	SKPD/UNIT SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
					3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA